

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN DISTRIBUSI
BARANG POKOK DI KOTA PALANGKA RAYA OLEH
DITRESKRIMSUS POLDA KALTENG**

Oleh:
GUSTI MAHARDHIKA
NIM 22.11.026366



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, ADMINISTRASI
DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
TAHUN 2026**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BARANG POKOK
DI KOTA PALANGKA RAYA OLEH DITRESKRIMSUS POLDA KALTENG

Oleh:
GUSTI MAHARDHIKA
NIM 22.11.026366

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal: Juni 2026
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:

1. Ketua Penguji : M.Nuur Tanja Putra, S.Sos.,M.A.P
2. Penguji Utama : Sholahuddin Shoum Abdurohman., M.A.P
3. Anggota Penguji I : Dr. Farid Zaky Yopiannor, S.Sos., M.Si
4. Anggota Penguji II : Anggelina Hariyanti, S.Sos, M.A.P

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd
NIDN. 1007058301

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipannya serta tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Palangka Raya, Juni 2026
Mahasiswa,

GUSTI MAHARDHIKA
NIM 22.11.026366

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, keluarga, dosen pembimbing, almamater Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, serta semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada seluruh personel Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah dan para pemangku kepentingan yang bekerja menjaga ketertiban distribusi barang pokok, stabilitas pasar, perlindungan konsumen, serta rasa aman masyarakat Kota Palangka Raya.

HALAMAN MOTO

“Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberi jalan bagi kemaslahatan masyarakat.”

“Kinerja organisasi publik dinilai dari kemampuannya menghadirkan hasil yang bertanggung jawab bagi masyarakat.”

“Selesaikan apa yang telah dimulai, karena konsistensi adalah bagian dari tanggung jawab.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pengawasan Distribusi Barang Pokok di Kota Palangka Raya oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Penelitian ini berangkat dari perhatian terhadap pentingnya kinerja lembaga penegak hukum dalam mendukung pengawasan distribusi barang pokok. Ditreskrimsus Polda Kalteng melalui fungsi reserse kriminal khusus dan keterlibatannya dalam Satgas Pangan memiliki posisi strategis untuk mencegah penyimpangan distribusi, menindaklanjuti aduan, membangun koordinasi, melakukan pengecekan pasar dan distributor, serta menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan tetap sesuai kewenangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan fakultas dan program studi, dosen pembimbing dan penguji, keluarga, rekan mahasiswa, Ditreskrimsus Polda Kalteng, pemerintah daerah, Bulog, pelaku usaha, pedagang, masyarakat, serta seluruh informan yang mendukung penelitian ini. Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan akses terhadap dokumen internal dan data operasional. Kritik dan saran yang membangun tetap diharapkan agar penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan administrasi publik dan peningkatan kinerja pengawasan distribusi barang pokok.

Palangka Raya, Juni 2026

GUSTI MAHARDHIKA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan distribusi barang pokok di Kota Palangka Raya. Fokus penelitian diarahkan pada kemampuan organisasi dalam menghasilkan kegiatan pengawasan, memberikan layanan pengawasan yang tepat, merespons perubahan harga dan pasokan, melaksanakan tugas sesuai kewenangan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengawasan kepada organisasi dan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan utama adalah pejabat dan personel Ditreskrimsus/Satgas Pangan, sedangkan OPD teknis, Bulog/distributor, pedagang, dan masyarakat digunakan sebagai informan pendukung untuk triangulasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Pisau analisis utama adalah teori kinerja organisasi publik Agus Dwiyanto yang mencakup produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pengawasan distribusi barang pokok tergolong cukup baik. Produktivitas terlihat dari pelaksanaan pemantauan harga, pengecekan stok, inspeksi pasar, pemeriksaan distributor, edukasi, koordinasi, dan tindak lanjut terhadap informasi dugaan pelanggaran. Kualitas layanan tercermin melalui pendekatan preventif dan pembinaan sebelum penegakan hukum, meskipun kanal pengaduan dan keterbukaan informasi tindak lanjut masih perlu diperkuat. Responsivitas sudah terlihat pada peningkatan pengawasan ketika terjadi gejolak harga dan menjelang hari besar, tetapi pengawasan masih cenderung berbasis momentum. Responsibilitas ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas berdasarkan mandat kepolisian dan regulasi perdagangan, namun dibutuhkan SOP terpadu untuk memperjelas batas pembinaan administratif dan penegakan hukum. Akuntabilitas telah berjalan melalui pelaporan dan koordinasi kelembagaan, tetapi indikator kinerja pengawasan dan penyampaian informasi publik

belum sepenuhnya terukur. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan data stok real time, jangkauan titik distribusi, keterbatasan personel, karakter pasokan luar daerah, dan belum optimalnya kanal pengaduan. Penelitian merekomendasikan pengawasan berbasis risiko, integrasi data, jadwal pengawasan rutin, SOP terpadu, penguatan kanal pengaduan, serta indikator kinerja yang terukur.

Kata Kunci: analisis kebijakan, kinerja organisasi publik, pengawasan, distribusi barang pokok, Ditreskrimsus.

ABSTRACT

This study analyzes the performance of the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Kalimantan Regional Police in implementing the policy of supervising basic commodity distribution in Palangka Raya City. The study focuses on the organization's ability to produce supervision outputs, provide appropriate supervisory services, respond to changes in prices and supply, carry out duties in accordance with its authority, and account for the implementation of supervision. A descriptive qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Key informants consisted of officials and personnel of the Special Criminal Investigation Directorate/Food Task Force, while technical agencies, Bulog/distributors, traders, and consumers served as supporting informants for triangulation. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The main analytical framework was Agus Dwiyanto's public organization performance theory, which includes productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability.

The findings indicate that the Directorate's performance in supervising basic commodity distribution is relatively good. Productivity is reflected in price monitoring, stock checking, market inspections, distributor examinations, education, coordination, and follow-up of alleged violations. Service quality is demonstrated through preventive and educational approaches prior to law enforcement, although complaint channels and follow-up transparency require improvement. Responsiveness is evident during price fluctuations and religious holiday periods, but supervision remains largely event-driven. Responsibility is reflected in compliance with police mandates and trade regulations; nevertheless, an integrated standard operating procedure is needed to clarify the boundary between administrative guidance and law enforcement. Accountability is implemented through institutional reporting and coordination, but performance indicators and public information are not yet fully measurable. Major

constraints include limited real-time stock data, a wide range of distribution points, limited personnel, external supply dependence, and underdeveloped complaint channels. The study recommends risk-based supervision, data integration, routine supervision schedules, integrated procedures, stronger complaint mechanisms, and measurable performance indicators.

Keywords: policy analysis, public organization performance, supervision, basic commodity distribution, special criminal investigation directorate.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoretis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Batasan Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	8
2.3 Analisis Kebijakan Publik.....	9
2.4 Konsep Kinerja Organisasi Publik.....	9
2.5 Teori Kinerja Organisasi Publik Agus Dwiyanto	10
2.5.1 Produktivitas	11
2.5.2 Kualitas Layanan.....	11

2.5.3 Responsivitas	11
2.5.4 Responsibilitas	11
2.5.5 Akuntabilitas	12
2.6 Konsep Pengawasan.....	12
2.7 Distribusi Barang Pokok	13
2.8 Ditreskrimsus Polda Kalteng dan Satgas Pangan.....	14
2.9 Kerangka Berpikir	14
2.10 Definisi Konseptual dan Operasional	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	17
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	17
3.3 Fokus Penelitian	17
3.4 Sumber Data.....	18
3.4.1 Data Primer	18
3.4.2 Data Sekunder	19
3.5 Informan Penelitian.....	19
3.6 Teknik Pengumpulan Data	20
3.6.1 Wawancara Mendalam.....	20
3.6.2 Observasi.....	20
3.6.3 Studi Dokumentasi	20
3.7 Teknik Analisis Data.....	20
3.8 Uji Keabsahan Data.....	21
3.9 Etika Penelitian	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
4.2 Kedudukan dan Peran Ditreskrimsus dalam Pengawasan	23
4.3 Karakteristik Informan	24
4.4 Konteks Distribusi Barang Pokok.....	25

4.5 Kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng.....	26
4.5.1 Produktivitas	27
4.5.2 Kualitas Layanan.....	29
4.5.3 Responsivitas	30
4.5.4 Responsibilitas	32
4.5.5 Akuntabilitas	33
4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	35
4.6.1 Faktor Pendukung	35
4.6.2 Faktor Penghambat.....	36
4.7 Pembahasan.....	37
4.7.1 Kinerja sebagai Pusat Analisis Kebijakan.....	37
4.7.2 Produktivitas dan Kebutuhan Pengawasan Berbasis Risiko	37
4.7.3 Kualitas Layanan dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan.....	38
4.7.4 Responsivitas dari Pola Reaktif menuju Deteksi Dini	38
4.7.5 Responsibilitas dan Kejelasan Batas Kewenangan	39
4.7.6 Akuntabilitas dan Pengukuran Hasil	39
4.8 Rekomendasi Penguatan Kinerja	40
BAB V PENUTUP.....	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48
Lampiran. Dokumentasi Penelitian.....	48
Lampiran. Riwayat Hidup Penulis	50

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 Isu Kebijakan dan Implikasi terhadap Kinerja Pengawasan</i>	<i>4</i>
<i>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu</i>	<i>7</i>
<i>Tabel 2.2 Indikator Kinerja Organisasi Publik</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2.3 Definisi Konseptual dan Operasional.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 3.1 Fokus Penelitian</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 3.2 Informan Penelitian</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 3.3 Tahapan Analisis Data.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 4.1 Kedudukan Kinerja Ditreskrimsus dalam Pengawasan</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 4.2 Karakteristik Informan.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 4.3 Kondisi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 4.4 Bentuk Kegiatan Pengawasan Ditreskrimsus</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 4.5 Analisis Produktivitas</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 4.6 Analisis Kualitas Layanan</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 4.7 Analisis Responsivitas.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 4.8 Analisis Responsibilitas</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 4.9 Analisis Akuntabilitas</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 4.10 Matriks Kinerja Ditreskrimsus</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 4.11 Faktor Pendukung dan Penghambat.....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 4.12 Rencana Penguatan Kinerja</i>	<i>40</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian</i>	15
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Barang pokok merupakan komoditas yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan beras, minyak goreng, gula, telur, daging, cabai, bawang, dan komoditas penting lainnya memengaruhi daya beli, ketenteraman sosial, tingkat inflasi, serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam perspektif administrasi publik, distribusi barang pokok tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari urusan publik yang membutuhkan pengaturan, pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban lembaga negara.

Gangguan distribusi barang pokok dapat muncul akibat peningkatan permintaan, keterlambatan pasokan, kondisi cuaca, biaya transportasi, panjangnya rantai distribusi, ketidakseimbangan stok, spekulasi, manipulasi informasi, maupun praktik penimbunan. Masalah tersebut cenderung meningkat menjelang hari besar keagamaan nasional dan ketika terjadi perubahan kondisi pasar secara cepat. Oleh karena itu, negara membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi risiko, mengumpulkan informasi, mencegah penyimpangan, memberikan pembinaan, dan melakukan penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Kota Palangka Raya memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan konsumsi. Sebagian kebutuhan barang pokok kota ini masih dipasok dari luar daerah sehingga ketersediaan dan harga mudah dipengaruhi kondisi distribusi antardaerah. Pasar Besar, Pasar Kahayan, jaringan ritel, gudang distributor, agen, grosir, dan pengecer menjadi bagian dari rantai distribusi yang perlu diawasi secara proporsional. Luasnya wilayah administrasi Kota Palangka Raya dan perbedaan akses antarwilayah juga menuntut pola pengawasan yang tidak hanya berpusat pada pasar utama, tetapi memperhatikan titik distribusi dan wilayah pinggiran.

Kerangka hukum nasional telah memberikan dasar bagi pengawasan distribusi barang pokok. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur perdagangan dalam negeri, distribusi barang, stabilisasi harga, dan larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam kondisi tertentu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 mengatur penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dalam konteks penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi dasar kewenangan kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ditreskrimsus Polda Kalteng merupakan unsur pelaksana tugas kepolisian pada tingkat kepolisian daerah yang menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus. Dalam pengawasan distribusi barang pokok, Ditreskrimsus memiliki posisi penting karena pengawasan dapat berhubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan, perlindungan konsumen, manipulasi stok, penimbunan, distribusi tidak sesuai ketentuan, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Melalui keterlibatan dalam Satgas Pangan, Ditreskrimsus juga menjalankan fungsi preventif berupa pemantauan, pengecekan, imbauan, edukasi, koordinasi, dan respons awal terhadap informasi masyarakat.

Aktivitas pengawasan tidak cukup dinilai hanya dari ada atau tidaknya inspeksi pasar. Yang lebih penting adalah kinerja Ditreskrimsus sebagai organisasi publik dalam mengubah mandat dan sumber daya menjadi hasil pengawasan yang bermanfaat. Kinerja tersebut mencakup produktivitas kegiatan, kualitas layanan pengawasan, kemampuan merespons masalah, kesesuaian tindakan dengan aturan, serta pertanggungjawaban atas proses dan hasil pengawasan. Fokus pada kinerja diperlukan agar penelitian dapat menjelaskan bukan hanya bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga seberapa baik Ditreskrimsus menjalankan perannya sebagai pelaksana pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam naskah awal, analisis lebih banyak diarahkan pada implementasi kebijakan melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Arah tersebut belum sepenuhnya menempatkan kinerja Ditreskrimsus sebagai pusat analisis. Penelitian ini kemudian dipertegas dengan menggunakan teori kinerja organisasi publik Agus Dwiyanto yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Teori tersebut dipilih karena mampu menilai hasil, proses pelayanan, kepekaan organisasi, kepatuhan terhadap prinsip administrasi, dan pertanggungjawaban organisasi publik secara lebih utuh.

Produktivitas digunakan untuk menilai keluaran pengawasan yang dihasilkan dibandingkan dengan sumber daya dan kebutuhan pengawasan. Kualitas layanan digunakan untuk melihat kejelasan, ketepatan, keadilan, dan kemudahan layanan pengawasan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Responsivitas menilai kemampuan Ditreskrimsus mengenali dan merespons gejolak harga, kelangkaan, laporan, dan kebutuhan masyarakat. Responsibilitas menilai kesesuaian tindakan dengan mandat, SOP, dan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas menilai pelaporan, keterbukaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengawasan.

Dengan fokus tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya, OPD teknis, Bulog, distributor, pedagang, dan masyarakat tetap penting, tetapi ditempatkan sebagai mitra dan sumber triangulasi untuk menilai kinerja Ditreskrimsus. Unit analisis utama penelitian adalah Ditreskrimsus Polda Kalteng. Pendekatan ini menjaga kesesuaian dengan judul penelitian, karena analisis kebijakan pengawasan diarahkan pada kinerja lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Tabel 1.1 Isu Kebijakan dan Implikasi terhadap Kinerja Pengawasan

Aspek	Kondisi/Isu	Implikasi terhadap Kinerja Ditreskrimsus
Ketersediaan barang	Sebagian komoditas bergantung pada pasokan luar daerah dan distributor utama.	Ditreskrimsus membutuhkan akses data stok, pemetaan distributor, dan pemeriksaan berbasis risiko.
Harga	Harga rentan meningkat menjelang hari besar atau ketika pasokan terganggu.	Kinerja dituntut responsif, tepat waktu, dan mampu membedakan kenaikan wajar dengan indikasi pelanggaran.
Distribusi	Rantai distribusi melibatkan distributor, agen, grosir, ritel, pedagang, dan pengecer.	Pengawasan harus produktif namun selektif berdasarkan tingkat kerawanan.
Penegakan hukum	Terdapat potensi penimbunan, manipulasi stok, dan pelanggaran perlindungan konsumen.	Tindakan harus responsibel, proporsional, berbasis bukti, dan sesuai kewenangan.
Koordinasi	Pengawasan melibatkan kepolisian, OPD, Bulog, pengelola pasar, dan pelaku usaha.	Ditreskrimsus perlu membangun kualitas koordinasi dan akuntabilitas tindak lanjut.
Pelayanan publik	Masyarakat membutuhkan informasi dan kanal pengaduan yang mudah.	Kualitas layanan dan respons atas aduan menjadi bagian penting penilaian kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Analisis Kebijakan Pengawasan Distribusi Barang Pokok di Kota Palangka Raya oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng” penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang terfokus mengenai kinerja Ditreskrimsus, faktor yang mendukung dan menghambat kinerja, serta rekomendasi peningkatan pengawasan yang sistematis, terukur, berbasis risiko, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pengawasan distribusi barang pokok di Kota Palangka Raya berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pengawasan distribusi barang pokok di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana rekomendasi penguatan kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pengawasan distribusi barang pokok di Kota Palangka Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pengawasan distribusi barang pokok berdasarkan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.
2. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pengawasan distribusi barang pokok.
3. Merumuskan rekomendasi penguatan kinerja pengawasan yang lebih rutin, terukur, transparan, terintegrasi, dan berbasis risiko.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian administrasi publik, khususnya analisis kebijakan dan kinerja organisasi publik pada lembaga penegak hukum. Penelitian juga memperluas penggunaan teori kinerja organisasi publik Agus Dwiyanto pada konteks pengawasan distribusi barang pokok, yang memiliki karakter gabungan antara pelayanan publik, koordinasi lintas sektor, pencegahan, dan penegakan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Ditreskrimsus Polda Kalteng, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi terhadap produktivitas kegiatan, kualitas layanan pengawasan, respons terhadap masalah, kesesuaian prosedur, dan akuntabilitas. Bagi pemerintah daerah, Bulog, pelaku usaha, dan pengelola pasar, penelitian dapat menjadi bahan untuk

memperkuat pertukaran data, koordinasi, dan pembagian peran. Bagi masyarakat, penelitian diharapkan mendukung layanan pengaduan dan pengawasan yang lebih mudah diakses, adil, dan responsif.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian dibatasi pada kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pengawasan distribusi barang pokok di Kota Palangka Raya. Komoditas yang menjadi konteks penelitian meliputi beras, minyak goreng, gula, telur, daging, cabai, bawang, dan LPG bersubsidi sebagai barang penting yang sering menjadi objek pemantauan. Penelitian tidak membahas produksi pertanian dan pembentukan harga secara ekonometrik. Pemerintah daerah, Bulog, distributor, pedagang, dan masyarakat diposisikan sebagai informan pendukung untuk menilai kinerja Ditreskrimsus, bukan sebagai unit analisis utama.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi disusun dalam lima bab. Bab I memuat pendahuluan. Bab II berisi penelitian terdahulu, konsep kebijakan publik, analisis kebijakan, kinerja organisasi publik, teori kinerja Agus Dwiyanto, pengawasan, distribusi barang pokok, Ditreskrimsus dan Satgas Pangan, kerangka berpikir, serta definisi operasional. Bab III menjelaskan metode penelitian. Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan kinerja Ditreskrimsus berdasarkan lima indikator. Bab V memuat kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran.